



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan HM. Rafi'i No. 3 Telp. (0532) 21052 Fax. (0532) 29002

PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Kepada : Yth. Ibu Bupati Kotawaringin Barat
Dari : Kepala Bappeda Kotawaringin Barat
Tanggal : 5 Agustus 2019
Perihal : **Laporan Hasil Pelaksanaan Rakordal Triwulan II Kabupaten Kotawaringin Barat T.A 2019 Dan Rencana Tindak Lanjut**

I. DASAR PELAKSANAAN

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- b. Permendagri No 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD Serta Tata cata Perubahan RPJPD, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan RAKORDAL Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan II Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk mengevaluasi capaian, tujuan dan sasaran RPJMD serta Renstra SKPD

III. NAMA KEGIATAN

Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2019

IV. HARI/TANGGAL

Kegiatan Rakordal Triwulan II Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada :
Hari/tanggal : Kamis, 1 Agustus 2019
Pukul : 07.30 – 12.00 WIB
Tempat : Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

V. PESERTA

Peserta yang hadir berjumlah 150 orang terdiri dari Kepala SKPD beserta sekretaris/Kabid/Kasubag Perencanaan/staf, Ketua beserta unsur pimpinan DPRD Kobar dan tim pembahas yang terdiri dari Kepala BPS Oo Suharto, S.ST, Rektor Universitas Antakusuma Prof. Dr. Ir. Jefry Watimena, MP dan Tokoh Masyarakat Drs. H. Sukirman, M.Si (Daftar peserta terlampir).

VI. MATERI DAN NARASUMBER :

Materi dan narasumber Rakordal TW II T.A 2019 terdiri dari :

No.	Materi	Pemateri
1.	Strategi Pencapaian Target SAKIP	Kabag Organisasi Amir Hadi, SE, M.Ec.Dev
2.	Capaian Renstra dan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Tahun 2018/2019	Inspektur Kabupaten Kobar Agus Suparji, SH, MH

3.	Upaya dan strategi meningkatkan profesionalitas ASN	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Dra. Aida Lailawati, M.Si
4.	Upaya dan strategi peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ir. M. Rosihan Pribadi, M.Si
5.	Upaya dan strategi penurunan PMKS	Kepala Dinas Sosial diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Sanitro, S.Sos
6.	Upaya dan strategi untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kobar diwakili oleh Kabid. Perlindungan Anak Dra. Eny Pudji Rahayu
7.	Upaya dan strategi meningkatkan Desa Mandiri	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) diwakili oleh Sekretaris Dinas PMD Teguh Winarno, AP

VII. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari forum pemaparan dan pembahasan materi, tersaji data-data sebagai berikut:

A. Materi Pendahuluan : Hasil rekapitulasi capaian indikator RPJMD

- Dari 7 (tujuh) Indikator tujuan dalam RPJMD, 2 indikator tujuan sudah mencapai target, 2 indikator tujuan belum mencapai target dan 3 indikator tujuan belum ada datanya.
- Dari 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, 16 sasaran sudah tercapai, 12 sasaran belum tercapai dan 9 sasaran tidak ada data.

B. Materi 1 : Strategi Pencapaian nilai SAKIP

- Nilai SAKIP Kabupaten 2018 adalah CC dari target B. Sedangkan target pada 2019 adalah A
- Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan capaian SAKIP antara lain :
 1. Ketidakselarasan dari sisi perencanaan meliputi komponen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK)
 2. Dari sisi pengukuran kinerja : belum ada formulasi penghitungan capaian IKU
 3. Dari sisi pelaporan : kurangnya informasi kinerja
 4. Evaluasi internal : belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program
 5. Capaian kinerja : belum ada monitoring capaian kinerja Perangkat Daerah
 6. Belum ada TIM SAKIP Kabupaten dan TIM SAKIP SKPD
- **Rekomendasi**/saran perbaikan untuk mengatasi kendala diatas antara lain :
 1. Koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara tiga SKPD pengampu yakni Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi SETDA dalam membina SKPD

2. Mengimplementasikan rekomendasi KEMENPAN RB dalam memperbaiki nilai SAKIP disertai formulasi perhitungan capaian.
3. Melakukan konsultasi kembali IKU dan Cascading yang telah dibahas di tingkat Kabupaten ke KEMENPAN RB
4. Efisiensi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dan mencoret anggaran yang tidak mendukung tercapainya visi misi Bupati.
5. Meningkatkan pengawasan kinerja SKPD, melakukan inovasi dan capaian outcome (tidak sekedar output) serta melakukan publikasi kinerja.
6. Pada bulan Agustus akan dilakukan pemetaan organisasi Perangkat Daerah (PD) dan hasilnya diharapkan akan mampu mempercepat pencapaian visi misi serta efisiensi anggaran
7. Untuk penerapan *reward* and *punishment* (penghargaan dan sanksi) dalam pencapaian nilai SAKIP akan dikonsultasikan dengan Ibu Bupati. Untuk level nasional, Kabupaten Kobar telah mendapat 2 (dua) *reward* dalam bentuk Dana Intensif Daerah (DID) dibidang fiskal dan bidang kesejahteraan

C. Materi 2 : Capaian Renstra dan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Tahun 2018/2019

- Target maturitas SPIP sampai akhir 2018 berhasil tercapai yakni pada **level 3**.
- Berdasarkan capaian SAKIP Tahun 2017 dan 2018, diperoleh data 3 (tiga) SKPD meningkat dan 3 (tiga) SKPD mengalami penurunan nilai SAKIP. 3 (tiga) SKPD yang meningkat nilai SAKIP adalah Bappeda, Inspektorat, dan Dinas PUPR. Adapun 3 (tiga) SKPD yang mengalami penurunan nilai SAKIP adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans).
- Peningkatan skor terjadi pada SKPD yang menindaklanjuti saran perbaikan dari Inspektorat. Sebagai contoh Diskominfo. Adapun SKPD yang tidak menindaklanjuti saran/perbaikan tidak mengalami peningkatan nilai SAKIP
- Pada tanggal 30 dan 31 Juli telah dilaksanakan bimtek Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka mendukung peningkatan nilai SAKIP
- Secara prinsip, SPIP menjadi tugas Kepala PD dan seluruh ASN
- Adapun terkait permintaan pendampingan perbaikan SAKIP akan dikoordinasikan dengan dinas teknis
- **Rekomendasi**/saran perbaikan untuk mengatasi persoalan yang ada antara lain :
 1. Pada dokumen Renstra :
 - 1.1 Dilakukan reviu dan membuat SOP
 - 1.2 Menselaraskan tujuan, sasaran, target dan indikator secara SMART
 2. Pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) :
 - 2.1 Memformalkan IKU dengan formula perhitungan
 - 2.2 Membuat PK Eselon II, III, IV dan IKI secara cascading
 - 2.3 Membuat Rencana Aksi
 - 2.4 SOP Monitoring Kinerja

3. Pada sisi pengukuran kinerja
 - 3.1 Menyusun SOP pengumpulan data kinerja
 - 3.2 Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berjenjang
 - 3.3 Dilaporkan minimal per triwulan
4. Pada bidang pelaporan
 - 4.1 Data yang disajikan memenuhi kriteria keandalan
 - 4.2 Lakukan revidi atas capaian kinerja
 - 4.3 Mempublikasikan semua dokumen SAKIP
5. Evaluasi Internal
 - 5.1 Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi program
 - 5.2 Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi rencana aksi

D. Materi 3 : Upaya dan strategi meningkatkan profesionalitas ASN

- Indeks profesionalitas ASN pada 2018 dari target 77 %, hanya terealisasi 64,97% (tidak mencapai target).
- Indeks profesionalitas ASN terdiri dari komponen kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin
- Tercatat 241 pejabat yang belum mengikuti diklatpim dengan rincian : eselon IV sebanyak 173 orang, eselon III sebanyak 32 orang dan eselon II sebanyak 1 orang
- Tahun ini hanya 10 orang eselon IV yang mengikuti diklatpim IV sehingga berpengaruh pada indeks profesional ASN. Kendala yang dihadapi antara lain :
 1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan TK II, III dan IV baru dilaksanakan awal Juli 2019
 2. Lelang jabatan JPTP/eselon II/b baru dapat dilaksanakan pada Agustus 2019
 3. Kegiatan seleksi ikatan dinas bersifat menunggu pelaksanaan dari institusi pendidikan yang melaksanakan seleksi
 4. Moratorium penerimaan ASN menyebabkan jumlah ASN semakin berkurang.
- Solusi :
 1. Peningkatan pendidikan PNS khususnya S-1 kebawah, pemberian tugas/izin belajar, menegakkan Disiplin ASN (sanksi), dan pengembangan kompetensi
 2. Secara bertahap, ASN akan ditempatkan sesuai kompetensi untuk perbaikan kinerja Perangkat Daerah
 3. Segera memprogramkan **(jika memungkinkan menambah kuota peserta serta anggaran)** diklat bagi pejabat eselon III dan IV
 4. Segera memproses administrasi keuangan Diklat kepemimpinan yang telah direncanakan untuk mempercepat serapan fisik dan keuangan
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi pendidikan (Ikatan dinas) mengenai pelaksanaan jadwal seleksi
 6. Panitia seleksi lelang JPTP sudah dibentuk dan dikoordinasikan dengan KASN
 7. Jika ada ASN yang bermasalah, hendaknya mengedepankan pembinaan

E. Materi 4 : Upaya dan strategi peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah

- Sampai akhir 2018, angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah tidak mencapai target. Untuk angka harapan lama sekolah dari target 12,80 tahun, hanya tercapai 12,70 tahun. Untuk angka rata-rata lama sekolah dari target 8,43 tahun, hanya terealisasi 8,36 tahun. Meski demikian, secara umum indeks harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat.
- Kondisi pendidikan Kabupaten Kobar Tahun 2018 :
 1. Sekolah belum akreditasi SD 3,7%, SMP 6,7%, SMA 0% dan SMK 50%
 2. Ruang kelas rusak SD 62 unit, SMP 18 unit, SMA 4 unit dan SMK 0 (tidak ada)
 3. Guru Belum Sertifikasi SD 56,1%, SMP 58%, SMA 44,5%, dan SMK 64,9%
 4. Pelaksanaan UNBK SMP 68,7%, SMA dan SMK 100%.
- Untuk informasi neraca pendidikan Kobar dapat diakses secara terbuka melalui web site **www.npd.data.kemdikbud.go.id**
- Rekomendasi/saran perbaikan :
 1. Menambah pagu anggaran untuk kejar paket A, B, dan C untuk meningkatkan capaian rata rata lama sekolah
 2. Melakukan pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas guru melalui sumber pendanaan yang tersedia

F. Materi 5 : Upaya dan strategi penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Persentase penurunan PMKS terhadap jumlah penduduk pada 2018 terealisasi 13,03% dari target 17% (target tidak tercapai)
- Kendala/penyebab tidak tercapai target tersebut antara lain :
 1. Keterbatasan anggaran dan SDM dalam pelayanan sosial (permasalahan klasik)
 2. Ketiadaan data dan informasi terpadu terkait kemiskinan dan PMKS
 3. Kurang maksimalnya aksesibilitas pelayanan rehabilitasi serta bantuan terhadap PMKS dan PSKS
 4. Rektor UNTAMA : PMKS tidak memiliki data lapangan dan dikhawatirkan bantuan tidak tepat sasaran. Perlu penyusunan basis data dan bukan sekedar penyerapan anggaran
 5. Kepala BPS : Angka kemiskinan Kobar jauh di bawah angka kemiskinan nasional dan provinsi. Tetapi, siapa dan dimana kelompok masyarakat yang miskin ? (by name, by adress) harus jelas. Data kemiskinan harus di up date 2 tahun sekali
 6. Drs. H. Sukirman, M,Si : Ada kelemahan dalam membangun data yang tidak valid/tidak sinkron. Pemerintahan NKRI yang integral seyogyanya memiliki data terintegrasi.
- Solusi :
 1. Perlu dilakukan penyesuaian anggaran disertai inovasi dalam upaya menjalankan program pelayanan sosial ke masyarakat supaya tetap berjalan meski dengan dana terbatas

2. Sudah ada MOU disduk, kesehatan dan semua pihak akan diajak melaksanakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) bagi PMKS, kemiskinan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sehingga penerima bantuan yang tidak memiliki KTP bisa tetap difasilitasi.
3. Perlu penyusunan data secara terintegrasi dan multifungsi khususnya terkait kemiskinan dan PMKS sebagai basis kebijakan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi lintas sektor

G. Materi 6 : Upaya dan strategi untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA)

- Dalam RPJMD Tahun 2018, target KLA adalah nilai 501 s.d 600. Sampai akhir 2018, terealisasi 570,05. Namun, berdasarkan verifikasi tahap penilaian mandiri, terjadi pengurangan skor dari Kementerian PPPA RI menjadi 460 atau target tidak tercapai
- Penyebab tidak tercapai target KLA antara lain :
 1. Di setiap SKPD belum bisa memenuhi jawaban dari pertanyaan evaluasi KLA
 2. SKPD kurang peduli bahwa KLA merupakan tanggung jawab bersama (kerja team). Adapun DP3A P2KB merupakan fasilitator dalam pengisian evaluasi KLA
 3. Belum adanya kerjasama antar Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pengembangan dan penyebarluasan mengenai KLA
- Solusi :
 1. Memperkuat komitmen dan kerjasama lintas SKPD bahwa KLA adalah tanggung jawab bersama
 2. Melengkapi basis data dan transparansi dalam memenuhi kriteria penilaian KLA
 3. SKPD segera melaksanakan program/kegiatan yang mendukung capaian KLA dan selama ini belum terlaksana
 4. Pasca Rakordal TW II 2019, akan dilaksanakan evaluasi KLA Tahun 2020
 5. Meminta keterlibatan Kepala Bappeda sebagai Koordinator Gugus Tugas KLA dalam rapat koordinasi untuk mencapai target KLA

H. Materi 7 : Upaya dan strategi meningkatkan Persentase Desa Mandiri

- Persentase Desa Mandiri Tahun 2018 dari target 5%, terealisasi 3,2% (target tidak tercapai). Persentase desa mandiri diperoleh dari perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM)
- Rincian tingkat perkembangan desa Tahun 2018 meliputi kategori Sangat Tertinggal 1 Desa, Tertinggal 23 Desa, Berkembang 41 Desa, Maju 16 Desa dan Mandiri belum ada yang terpenuhi.
- Rincian tingkat perkembangan desa Tahun 2019 meliputi kategori Sangat Tertinggal 2 Desa, Tertinggal 6 Desa, Berkembang 51 Desa, Maju 19 Desa dan Mandiri 3 Desa
- IDM : di Provinsi Kalteng baru 5 desa mandiri. Di Kobar ada 3 Desa. Yang lain belum ada
- Kepala BPS : mulai 2019, **BPS akan mendata potensi desa setiap tahun untuk menindaklanjuti instruksi dari Kemenkeu. Data ini nantinya**

akan menjadi dasar bagi penentuan indeks kesulitan geografis yang menjadi acuan bagi pengalokasian dana desa

- Kendala/penyebab antara lain :
 1. Belum pernah dilaksanakan analisis/pemetaan masalah dan potensi desa
 2. Desa kesulitan memperoleh data yang bersifat lintas sektor seperti jumlah peserta JKN, jumlah nasabah bank dan lain lain
 3. Pemenuhan kebutuhan yang menjadi indikator penilaian memerlukan kerjasama lintas sektor/dinas teknis
 4. Dimensi dalam IDM adalah Ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Di antara titik lemah dalam pencapaian desa mandiri adalah pada aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana
 5. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa, ADD dan PADesa serta komitmen Pemerintah Daerah disertai pendampingan yang berkelanjutan guna mencapai target desa mandiri
 6. Melibatkan Pabrik Besar Sawit (PBS)/swasta terdekat dalam mendukung pencapaian desa mandiri
- Solusi :
 1. Memperkuat penyediaan data dasar maupun data pendukung sebagai basis analisis /pemetaan masalah dan potensi
 2. Perlu kebijakan khusus dari pemerintah daerah yang fokus pada pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM)
 3. Program/kegiatan desa diarahkan untuk pencapaian target indeks desa membangun
 4. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam mendukung capaian IDM khususnya pada bidang lingkungan hidup dan tanggap bencana

I. STRESSING WAKIL BUPATI

Di akhir acara, Wakil Bupati Kobar menyampaikan sejumlah stressing dan evaluasi terkait dengan pembahasan Rakordal antara lain :

1. Pemberian TPP diharapkan mampu meningkatkan kinerja ASN. Namun, dari hasil evaluasi tidak sesuai harapan karena masih banyak indikator sasaran RPJMD yang belum tercapai
2. Ada 2 (dua) kemungkinan yakni pertama, belum paham atau kedua, sudah paham namun enggan untuk melaksanakan
3. Kedepan, perlu dilakukan perubahan pola perencanaan dan penganggaran. Perubahan yang dimaksud adalah :
 - 3.1 Penyusunan APBD 2020 dan periode selanjutnya harus mengakomodasi hasil Rakordal
 - 3.2 Dalam pembagian pagu indikatif tidak sekedar mengacu pada tingkat serapan anggaran. Namun, harus mempertimbangkan capaian indikator kinerja
 - 3.3 RPJMD sebisa mungkin disusun secara kompherensif dan penetapan target berdasarkan atas sumber daya dan anggaran yang tersedia
4. Saya instruksikan kepada Bappeda untuk dapat menjalankan fungsi pengendalian pembangunan sebaik mungkin agar target sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD mampu tercapai sesuai rencana

J. RENCANA TINDAK LANJUT

- Kepala Bappeda selaku koordinator gugus tugas segera berkoordinasi dengan dinas teknis untuk melakukan evaluasi dan menyusun rencana aksi pencapaian target KLA dan SAKIP dalam tahun 2019. Jika tidak memungkinkan, maka diharapkan akan tercapai pada tahun 2020
- Menetapkan target dan realisasi beserta formula perhitungan pada IKU Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan TII (sedang dalam kajian oleh pihak ketiga)
- Kepala SKPD teknis khususnya yang mengampu sasaran RPJMD agar segera melakukan evaluasi kinerja, capaian target dan kelengkapan data pendukung capaian indikator kinerja RPJMD
- Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi segera melakukan koordinasi, pendampingan SKPD dan upaya percepatan dalam rangka pencapaian target SAKIP
- Pagu Anggaran pada APBD Tahun 2020 yang bersumber dari perencanaan teknokratik di prioritaskan untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- TAPD diberikan kewenangan untuk mengalihkan pagu kegiatan usulan teknokratik yang tidak fokus dalam pencapaian target RPJMD dan SPM. **Kebijakan ini disarankan dituangkan dalam pedoman penyusunan RKA-SKPD**

Demikian disampaikan, mohon petunjuk/keputusan pimpinan

Pangkalan Bun, 28 Agustus 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

ttd

Drs. MUHAMMAD FAUZI, M.Si
NIP. 19600103 199003 1 004